

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik

Informan : Kepala Dinas Pariwisata

A. Efektivitas (Effectiveness)

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya dalam pengembangan sektor wisata religi di wilayah Kabupaten Gresik?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih ada aspek dari kebijakan ini yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pengembangan sektor wisata religi?
3. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan atau hambatan tertentu dalam pelaksanaannya?

B. Efisiensi (Efficiency)

1. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara efisien?
2. Apakah ada proses atau kegiatan yang dianggap kurang efisien dalam implementasi kebijakan ini?
3. Apakah terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan ini?
4. Bagaimana partisipasi dan kerjasama antarinstansi terkait dalam mendukung efisiensi pelaksanaan kebijakan ini?

C. Kecukupan (Adequacy)

1. Apakah bapak/ibu merasa bahwa sumber daya yang tersedia, baik itu finansial, tenaga kerja, infrastruktur cara mencegah cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan efektif?
2. Menurut Bapak atau Ibu apakah strategi yang diatur dalam kebijakan ini sudah cukup untuk mengatasi tantangan dan apa adanya dihadapi dalam pengembangan sektor wisata religi di wilayah ini?
3. Apakah terdapat kekurangan toko pasangan dalam kebijakan ini yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya?

D. Pemerataan (Equity)

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada ketidaksetaraan atau diskriminasi yang masih ada dalam distribusi manfaat atau aksesibilitas terhadap wisata religi di Kabupaten Gresik?

2. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kebijakan ini telah berhasil memastikan ahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan adil dalam pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik?
3. Apa saran atau rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemerataan dalam kebijakan ini ke depannya?

E. Ketepatan (Appropriateness)

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait relevansi dan ketepatan strategi yang diusulkan dalam kebijakan ini untuk mengatasi masalah infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan pengembangan wisata sektor religi, serta optimalisasi penerimaan retribusi?
2. Menurut penilaian Bapak/Ibu, seberapa baik kebijakan ini mempertimbangkan aspek-aspek budaya, sosial, dan agama yang relevan dengan pengelolaan wisata religi di Kabupaten Gresik?
3. Apakah ada aspek-aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Bapak/Ibu tidak sesuai atau tidak tepat dengan konteks lokal atau kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik?

F. Responsivitas (Responsiveness)

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat fleksibilitas kebijakan ini dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan atau kondisi di lapangan terkait sektor wisata religi?
2. Apakah terdapat contoh konkret di mana kebijakan ini telah berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat terkait sektor wisata religi?
3. Bagaimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan ini?

Informan : Pengelola Wisata Religi

Efektivitas (Effectiveness)

1. Berdasarkan pengalaman Anda dalam mengelola wisata religi di wilayah ini, apa yang telah berhasil dicapai berkat implementasi kebijakan ini?
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kinerja kebijakan ini dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengembangan wisata religi di Kabupaten Gresik?
3. Menurut Anda, sejauh mana keterlibatan dan kerjasama antara pihak pengelola wisata, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan ini?

Efisiensi (Efficiency)

1. Apakah terdapat proses atau langkah-langkah tertentu dalam implementasi kebijakan ini yang menurut Bapak/Ibu efisien atau tidak efisien?

2. Bagaimana pendapat Anda tentang alokasi sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, yang diperlukan untuk mematuhi kebijakan ini dalam pengelolaan wisata religi?
3. Apakah ada aspek-aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Anda mempengaruhi kinerja operasional pengelolaan wisata religi secara positif atau negatif dari sudut pandang efisiensi?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan ini sejauh ini?

Kecukupan (Adequacy)

1. Apakah terdapat area atau aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Bapak/Ibu masih kurang memadai atau perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan pengembangan wisata religi?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kecukupan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, yang disediakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini?
3. Apakah kebijakan ini cukup mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik?

Pemerataan (Equity)

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, termasuk masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan wisatawan?
2. Apakah terdapat area atau kelompok tertentu yang menurut Bapak/Ibu belum merasakan manfaat atau kesempatan yang sama akibat pelaksanaan kebijakan ini?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang distribusi sumber daya, termasuk anggaran dan infrastruktur, yang dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan ini? Apakah pemerataannya cukup memadai?
4. Apakah ada saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini guna memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat yang sama dalam pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik?

Ketepatan (Appropriateness)

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang relevansi atau hubungan kebijakan ini terhadap tujuan umum pengembangan sektor wisata religi di wilayah ini?
2. Menurut pengalaman Anda sebagai pengelola wisata religi, apakah implementasi kebijakan ini telah memberikan solusi yang tepat bagi masalah-

masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik?

Responsivitas (Responsiveness)

1. Apakah terdapat upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespons umpan balik dan masukan dari pengelola wisata religi terkait dengan implementasi kebijakan ini?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sendiri dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah terkait dengan upaya untuk meningkatkan responsivitas kebijakan ini terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi?

Informan : Masyarakat

Efektivitas (Effectiveness)

1. Bagaimana menurut Anda dampak dari kebijakan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten kami?
2. Apakah menurut Anda kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini?
3. Apa saja perubahan yang Anda lihat atau alami di sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan ini?

Efisiensi (Efficiency)

1. Apakah ada hal-hal tertentu yang menurut Anda bisa dioptimalkan atau ditingkatkan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan ini?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang efisiensi dengan implementasi kebijakan ini?

Kecukupan (Adequacy)

1. Apakah menurut Anda kebijakan ini sudah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata?
2. Apa saja hal-hal yang menurut Anda masih kurang memadai dalam kebijakan ini dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini?

Pemerataan (Equity)

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesetaraan akses dan peluang bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal?

2. Apakah Anda melihat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini antara berbagai kelompok masyarakat atau daerah?
3. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara adil?

Ketepatan (Appropriateness)

1. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan peraturan daerah no. 5 tahun 2012 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah Kabupaten kami?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian kebijakan ini dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar destinasi wisata religi?
3. Apakah Anda melihat adanya aspek-aspek dalam kebijakan ini yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal

Responsivitas (Responsiveness)

1. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini?
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap mekanisme komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ini?
3. Apakah Anda melihat adanya penyesuaian atau perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Informan : Ibu Dwi Mustika Sari S.T Par
 Jabatan : Analis Obyek Wisata Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 Kabupaten Gresik
 Tanggal : 17 April 2024

A. Efektivitas (Effectiveness)	
1. Sejauh mana kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya dalam pengembangan sektor wisata religi di wilayah Kabupaten Gresik?	
	Kebijakan ini sudah bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan pengembangan sektor wisata religi di wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta perbaikan fasilitas di destinasi wisata seperti pendirian museum di Sunan Giri dan peningkatan amenities di lokasi-lokasi wisata religi lainnya
2. Apakah masih ada aspek dari kebijakan ini yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pengembangan sektor wisata religi?	
	Iya, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, peningkatan fasilitas pendukung seperti parkir, akomodasi, dan infrastruktur lainnya juga perlu ditingkatkan untuk lebih menarik wisatawan.
3. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan atau hambatan tertentu dalam pelaksanaannya?	
	Tantangan dan hambatan pasti ada, termasuk dalam hal anggaran yang terbatas dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Namun, kami selalu berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan stakeholder terkait.
B. Efisiensi (Efficiency)	
1. Apakah sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara efisien?	
	Dinas Pariwisata Gresik yakin bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efisien. Adanya UPT destinasi wisata terpadu yang membawahi makam Sunan Giri dan Malik Ibrahim membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
2. Apakah ada proses atau kegiatan yang dianggap kurang efisien dalam implementasi kebijakan ini?	

Beberapa proses birokrasi yang panjang kadang menghambat pelaksanaan program. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur mengalami keterlambatan yang perlu diperbaiki.
3. Apakah terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan ini?
Iya, kami terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait. Kami juga berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada.
4. Bagaimana partisipasi dan kerjasama antarinstansi terkait dalam mendukung efisiensi pelaksanaan kebijakan ini?
Partisipasi dan kerjasama antarinstansi sudah berjalan baik, tetapi masih bisa ditingkatkan. Kami terus berusaha memperbaiki koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain untuk mendukung efisiensi pelaksanaan kebijakan ini.
C. Kecukupan (Adequacy)
1. Apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan efektif?
Sumber daya yang ada sudah cukup, tetapi masih bisa ditingkatkan terutama dalam hal anggaran dan tenaga kerja untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan lebih efektif.
2. Apakah strategi yang diatur dalam kebijakan ini sudah cukup untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor wisata religi di wilayah ini?
Secara umum, strategi yang ada sudah cukup baik. Namun, ada beberapa area yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti peningkatan fasilitas dan promosi.
3. Apakah terdapat kekurangan dalam kebijakan ini yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya?
Iya, beberapa fasilitas pendukung masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam hal promosi dan pemasaran.
D. Pemerataan (Equity)
1. Apakah ada ketidaksetaraan atau diskriminasi dalam distribusi manfaat atau aksesibilitas terhadap wisata religi di Kabupaten Gresik?

<p>- Saat ini, kami tidak melihat adanya ketidaksetaraan atau diskriminasi yang signifikan dalam distribusi manfaat atau aksesibilitas terhadap wisata religi. Namun, kami terus berusaha untuk memastikan pemerataan dalam semua aspek.</p>
<p>2. Apakah kebijakan ini telah berhasil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan adil dalam pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik?</p>
<p>- Iya, kebijakan ini telah berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan adil. Kami selalu mengadakan forum diskusi dan pertemuan untuk mendengarkan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat.</p>
<p>3. Apa saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan dalam kebijakan ini ke depannya?</p>
<p>- Untuk meningkatkan pemerataan, kami perlu lebih fokus pada peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di semua lokasi wisata religi, termasuk yang kurang dikenal. Selain itu, penting untuk terus melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata religi.</p>
<p>E. Ketepatan (Appropriateness)</p>
<p>1. Bagaimana tanggapan terkait relevansi dan ketepatan strategi yang diusulkan dalam kebijakan ini untuk mengatasi masalah infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan pengembangan wisata sektor religi, serta optimalisasi penerimaan retribusi?</p>
<p>- Strategi yang diusulkan dalam kebijakan ini dianggap tepat untuk mengatasi masalah infrastruktur dan fasilitas, serta meningkatkan pengembangan wisata sektor religi dan optimalisasi penerimaan retribusi. Langkah-langkah ini sejalan dengan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan standar dan daya saing destinasi pariwisata lokal.</p>
<p>2. Seberapa baik kebijakan ini mempertimbangkan aspek-aspek budaya, sosial, dan agama yang relevan dengan pengelolaan wisata religi di Kabupaten Gresik?</p>
<p>- Kebijakan ini sudah cukup baik dalam mempertimbangkan aspek-aspek budaya, sosial, dan agama yang relevan. Pengelolaan wisata religi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal yang ada.</p>
<p>3. Apakah ada aspek-aspek tertentu dalam kebijakan ini yang tidak sesuai atau tidak tepat dengan konteks lokal atau kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik</p>

<p>- Secara umum, kebijakan ini sudah sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa area yang masih perlu disesuaikan lebih lanjut untuk lebih memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat lokal.</p>
<p>F. Responsivitas (Responsiveness)</p>
<p>1. Bagaimana menilai tingkat fleksibilitas kebijakan ini dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan atau kondisi di lapangan terkait sektor wisata religi?</p>
<p>- Kebijakan ini cukup fleksibel dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan atau kondisi di lapangan. Kami terus melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan.</p>
<p>2. Apakah terdapat contoh konkret di mana kebijakan ini telah berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat terkait sektor wisata religi?</p>
<p>- Salah satu contoh konkret adalah peningkatan fasilitas dan infrastruktur di makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim berdasarkan masukan dari masyarakat dan pengunjung. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan.</p>
<p>3. Bagaimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan ini?</p>
<p>- Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting. Kami selalu menyelenggarakan forum diskusi, survei, dan pertemuan untuk mendengarkan pandangan dari warga lokal, pelaku usaha pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan mereka sangat berharga dalam proses penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan ini.</p>

Informan : Bapak M. Bisri
 Jabatan : Pengelola Makam Sunan Giri
 Tanggal : 17 April 2024

Efektivitas (Effectiveness)
1. Berdasarkan pengalaman Anda dalam mengelola wisata religi di wilayah ini, apa yang telah berhasil dicapai berkat implementasi kebijakan ini?
- Kebijakan ini telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengembangan sektor wisata religi, sehingga kami bisa memajukan destinasi seperti makam Sunan Giri. Pembangunan museum yang telah meraih penghargaan dan peningkatan fasilitas pengunjung seperti pasar wisata adalah contoh keberhasilan yang dicapai berkat kebijakan ini.
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kinerja kebijakan ini dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengembangan wisata religi di Kabupaten Gresik?
- Kebijakan ini cukup baik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Meski masih ada hambatan seperti birokrasi dan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan pengelola cagar budaya, langkah-langkah seperti pelatihan dan sosialisasi telah membantu meningkatkan standar dan kualitas layanan.
3. Menurut Anda, sejauh mana keterlibatan dan kerjasama antara pihak pengelola wisata, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan ini?
- Keterlibatan dan kerjasama antara pengelola wisata, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sangat berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan ini. Dengan adanya komunikasi aktif dan koordinasi yang baik, kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.
Efisiensi (Efficiency)
1. Apakah terdapat proses atau langkah-langkah tertentu dalam implementasi kebijakan ini yang menurut Anda efisien atau tidak efisien?
- Beberapa proses birokrasi yang panjang terkadang menghambat pelaksanaan program, yang dianggap kurang efisien. Namun, adanya UPT destinasi wisata terpadu membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wisata.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang alokasi sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, yang diperlukan untuk mematuhi kebijakan ini dalam pengelolaan wisata religi?
- Alokasi sumber daya sudah cukup baik, meskipun kadang terbatas. Sumber daya yang ada, seperti anggaran dan tenaga kerja, sudah dimanfaatkan dengan optimal untuk mematuhi kebijakan ini.
3. Apakah ada aspek-aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Anda mempengaruhi kinerja operasional pengelolaan wisata religi secara positif atau negatif dari sudut pandang efisiensi?

<p>- Adanya arahan dan landasan hukum yang jelas mempengaruhi kinerja operasional secara positif. Namun, ketergantungan pada keputusan dari tingkat yang lebih tinggi, seperti Kementerian Pariwisata, kadang menghambat efisiensi.</p>
<p>Kecukupan</p>
<p>1. Apakah terdapat area atau aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Anda masih kurang memadai atau perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan pengembangan wisata religi?</p>
<p>- Perlu ada peningkatan dalam aspek promosi dan pemasaran destinasi wisata religi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti parkir dan akomodasi masih perlu ditingkatkan.</p>
<p>2. Bagaimana pendapat Anda tentang kecukupan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, yang disediakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini?</p>
<p>- Sumber daya yang disediakan sudah cukup, namun masih bisa ditingkatkan. Ketersediaan anggaran dan tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara optimal.</p>
<p>3. Apakah kebijakan ini cukup mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik?</p>
<p>- Kebijakan ini sudah cukup mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap destinasi, tetapi perlu penyesuaian lebih lanjut untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing lokasi wisata.</p>
<p>Pemerataan (Equity)</p>
<p>1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, termasuk masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan wisatawan?</p>
<p>- Upaya yang dilakukan sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Pemerataan manfaat harus terus dipantau dan ditingkatkan, terutama bagi masyarakat lokal.</p>
<p>2. Apakah terdapat area atau kelompok tertentu yang menurut Anda belum merasakan manfaat atau kesempatan yang sama akibat pelaksanaan kebijakan ini?</p>
<p>- Masih ada beberapa kelompok yang belum merasakan manfaat yang sama, seperti masyarakat di sekitar area makam yang masih banyak peminta-minta. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih.</p>
<p>3. Bagaimana pendapat Anda tentang distribusi sumber daya, termasuk anggaran dan infrastruktur, yang dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan ini? Apakah pemerataannya cukup memadai?</p>
<p>- Distribusi sumber daya sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat yang sama. Pemerataan infrastruktur harus lebih diperhatikan.</p>
<p>4. Apakah ada saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh Anda untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini guna memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat yang sama dalam pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik?</p>

<p>- Perlu adanya program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi wisata dan mengurangi kesenjangan. Selain itu, peningkatan infrastruktur di semua lokasi wisata harus menjadi prioritas.</p>
<p>Ketepatan (Appropriateness)</p>
<p>1. Bagaimana pendapat Anda tentang relevansi atau hubungan kebijakan ini terhadap tujuan umum pengembangan sektor wisata religi di wilayah ini?</p>
<p>- Kebijakan ini sangat relevan dan mendukung tujuan umum pengembangan sektor wisata religi. Dengan landasan hukum yang jelas, kebijakan ini memberikan arah yang tepat bagi pengelolaan dan pengembangan wisata religi.</p>
<p>2. Apakah implementasi kebijakan ini telah memberikan solusi yang tepat bagi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik?</p>
<p>- Iya, kebijakan ini telah memberikan solusi yang tepat, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Dengan adanya panduan yang jelas, pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata menjadi lebih terarah.</p>
<p>Responsivitas (Responsiveness)</p>
<p>1. Apakah terdapat upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespons umpan balik dan masukan dari pengelola wisata religi terkait dengan implementasi kebijakan ini?</p>
<p>- Pemerintah daerah telah mengadakan forum diskusi, survei, dan pertemuan untuk mendengarkan umpan balik dan masukan dari pengelola wisata religi. Ini menunjukkan adanya upaya konkret untuk merespons kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.</p>
<p>2. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah terkait dengan upaya untuk meningkatkan responsivitas kebijakan ini terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi?</p>
<p>- Interaksi dengan pemerintah daerah cukup baik. Kami merasa didengarkan dan pandangan kami diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata. Namun, peningkatan koordinasi dan komunikasi masih diperlukan untuk lebih meningkatkan responsivitas kebijakan ini.</p>

Informan : Bapak Sudasir
 Jabatan : Pengelola Makam Sunan Giri
 Tanggal : 17 April 2024

Efektivitas (Effectiveness)
1. Berdasarkan pengalaman Anda dalam mengelola wisata religi di wilayah ini, apa yang telah berhasil dicapai berkat implementasi kebijakan ini?
Implementasi kebijakan telah mencapai tujuannya dalam mengembangkan sektor pariwisata di Makam Maulana Malik Ibrahim. Terlihat perubahan positif seperti peningkatan fasilitas wisata yang lebih baik.
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kinerja kebijakan ini dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengembangan wisata religi di Kabupaten Gresik?
Kinerja kebijakan dinilai baik dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengembangan wisata religi, terutama dengan memberikan landasan hukum yang jelas dan mendukung bagi pengelolaan dan pengembangan obyek wisata religi.
3. Menurut Anda, sejauh mana keterlibatan dan kerjasama antara pihak pengelola wisata, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan ini?
Keterlibatan dan kerjasama antara pihak pengelola wisata, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas kebijakan ini, terutama dalam memberikan arahan yang jelas dan koordinasi yang baik.
Efisiensi (Efficiency)
1. Apakah terdapat proses atau langkah-langkah tertentu dalam implementasi kebijakan ini yang menurut Anda efisien atau tidak efisien?
Proses implementasi kebijakan dinilai efisien, namun masih ada ruang untuk peningkatan melalui kerjasama yang lebih baik antar stakeholder dan evaluasi terus-menerus
2. Bagaimana pendapat Anda tentang alokasi sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, yang diperlukan untuk mematuhi kebijakan ini dalam pengelolaan wisata religi?
Alokasi sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, dianggap cukup baik, meskipun perlu peningkatan lagi terutama dalam pelatihan tenaga kerja terlatih..
3. Apakah ada aspek-aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Anda mempengaruhi kinerja operasional pengelolaan wisata religi secara positif atau negatif dari sudut pandang efisiensi?
Aspek-aspek tertentu dalam kebijakan ini memengaruhi kinerja operasional pengelolaan wisata religi secara positif, terutama dalam memastikan kesesuaian dengan karakteristik setiap destinasi wisata.

Kecukupan
1. Apakah terdapat area atau aspek tertentu dalam kebijakan ini yang menurut Anda masih kurang memadai atau perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan pengembangan wisata religi?
Meskipun kebijakan telah berhasil, masih ada area yang perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan pengembangan wisata religi, terutama dalam konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat setempat..
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kecukupan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, yang disediakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini?
Ketersediaan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, dinilai sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam memastikan kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal..
3. Apakah kebijakan ini cukup mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik?
Kebijakan dinilai cukup mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik.
Pemerataan (Equity)
1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, termasuk masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan wisatawan?
Upaya yang dilakukan dalam memastikan pemerataan manfaat kebijakan dinilai baik, namun masih ada area atau kelompok tertentu yang belum merasakan manfaat secara sepenuhnya.
2. Apakah terdapat area atau kelompok tertentu yang menurut Anda belum merasakan manfaat atau kesempatan yang sama akibat pelaksanaan kebijakan ini?
Distribusi sumber daya dianggap cukup memadai, namun perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan pemerataannya..
3. Bagaimana pendapat Anda tentang distribusi sumber daya, termasuk anggaran dan infrastruktur, yang dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan ini? Apakah pemerataannya cukup memadai?
- Distribusi sumber daya sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat yang sama.
Ketepatan (Appropriateness)
1. Bagaimana pendapat Anda tentang relevansi atau hubungan kebijakan ini terhadap tujuan umum pengembangan sektor wisata religi di wilayah ini?
- Kebijakan dinilai relevan dengan tujuan umum pengembangan sektor wisata religi di wilayah tersebut.
2. Apakah implementasi kebijakan ini telah memberikan solusi yang tepat bagi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik?

Implementasi kebijakan dianggap memberikan solusi yang tepat bagi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik.
Responsivitas (Responsiveness)
1. Apakah terdapat upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespons umpan balik dan masukan dari pengelola wisata religi terkait dengan implementasi kebijakan ini?
Terdapat upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespons umpan balik dan masukan dari pengelola wisata religi terkait dengan implementasi kebijakan ini.
2. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah terkait dengan upaya untuk meningkatkan responsivitas kebijakan ini terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi?
Pengalaman dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan ini cukup baik, dengan pemerintah daerah yang responsif terhadap masukan dan umpan balik dari pengelola wisata religi..

Informan : Ibu Nur (40 Tahun)
 Jabatan : Pengunjung makam Maulana Malik Ibrahim
 Tanggal : 6 Mei 2024

Efektivitas (Effectiveness)
1. Bagaimana menurut Anda dampak dari kebijakan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten kami?
Kebijakan telah memiliki dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten, terutama di kawasan Makam Mulana Malik Ibrahim yang dinikmati oleh pengunjung.
2. Apakah menurut Anda kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini?
Menurut pendapat Ibu Nur, kebijakan ini berhasil mencapai tujuan-tujuannya dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas di kawasan wisata religi.
3. Apa saja perubahan yang Anda lihat atau alami di sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan ini?
Perubahan yang terlihat di sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan ini adalah peningkatan fasilitas dan sumber daya di sekitar Makam Mulana Malik Ibrahim.
Efisiensi (Efficiency)
1. Apakah ada hal-hal tertentu yang menurut Anda bisa dioptimalkan atau ditingkatkan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan ini?
Ada potensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama dalam pengelolaan dana dan koordinasi antarinstansi terkait.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang efisiensi dengan implementasi kebijakan ini?
Terdapat potensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi terkait.
Kecukupan (Adequacy)
1. Apakah menurut Anda kebijakan ini sudah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata?
Menurut Ibu Nur, kebijakan ini sudah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, terutama dengan peningkatan kualitas fasilitas.
2. Apa saja hal-hal yang menurut Anda masih kurang memadai dalam kebijakan ini dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata?
Meskipun demikian, masih ada hal-hal yang perlu diperkuat, terutama dalam konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat setempat untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal
3. Bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini?

Ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya dinilai sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam pelatihan tenaga kerja terlatih.
Pemerataan (Equity)
1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesetaraan akses dan peluang bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal?
Akses dan peluang dalam industri pariwisata dinilai cukup setara bagi semua pihak yang terlibat, namun masih perlu perhatian lebih terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.
2. Apakah Anda melihat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini antara berbagai kelompok masyarakat atau daerah?
Ada upaya untuk memastikan pemerataan manfaat dari kebijakan ini, namun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin belum merasakan manfaat secara penuh.
3. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara adil?
Saran untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini termasuk peningkatan dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
Ketepatan (Appropriateness)
1. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan peraturan daerah no. 5 tahun 2012 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah Kabupaten kami?
Kebijakan peraturan daerah no. 5 tahun 2012 dinilai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah Kabupaten, terutama dengan memberikan manfaat kepada banyak pihak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian kebijakan ini dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar destinasi wisata religi?
Kesesuaian kebijakan ini dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar destinasi wisata religi juga dinilai baik oleh pengunjung.
3. Apakah Anda melihat adanya aspek-aspek dalam kebijakan ini yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal?
Meskipun demikian, perlu perhatian lebih terhadap aspek-aspek dalam kebijakan ini yang mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal.
Responsivitas (Responsiveness)
1. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini?
Pemerintah dinilai telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama dengan memperhatikan masukan dari pengunjung dan pihak terkait lainnya
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap mekanisme komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ini?

Mekanisme komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ini dinilai cukup baik oleh Ibu Nur.

3. Apakah Anda melihat adanya penyesuaian atau perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini?

Ada penyesuaian dan perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini, menunjukkan respons yang memadai dari pemerintah terhadap kebutuhan dan masukan masyarakat.

Informan : Ayu (25 Tahun)

(Pengunjung Makam Sunan Giri dan Makam Maulana malik Ibrahim)

Tanggal : 17 April 2024

Efektivitas (Effectiveness)
1. Bagaimana menurut Anda dampak dari kebijakan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten kami?
Kalau kebijakan saya kurang paham ya mbak. Tapi pasti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terutama pada hari libur dan acara-acara tertentu seperti haul. Fasilitas di tempat-tempat wisata religi, seperti Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim, dinilai baik oleh pengunjung.
2. Apakah menurut Anda kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini?
Kebijakan ini dianggap berhasil mencapai tujuan-tujuannya dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan kualitas fasilitas.
3. Apa saja perubahan yang Anda lihat atau alami di sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan ini?
Perubahan yang terlihat setelah diterapkannya kebijakan ini adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan kualitas fasilitas di tempat-tempat wisata religi.
Efisiensi (Efficiency)
1. Apakah ada hal-hal tertentu yang menurut Anda bisa dioptimalkan atau ditingkatkan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan ini?
Ada potensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama dalam pengelolaan dana dan koordinasi antarinstansi terkait.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang efisiensi dengan implementasi kebijakan ini?
Secara umum, implementasi kebijakan dinilai cukup efisien, namun masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam penggunaan sumber daya.
Kecukupan (Adequacy)
1. Apakah menurut Anda kebijakan ini sudah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata?
Kebijakan ini dianggap memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, terutama dalam peningkatan kualitas fasilitas.
2. Apa saja hal-hal yang menurut Anda masih kurang memadai dalam kebijakan ini dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata?
Meskipun demikian, masih ada hal-hal yang perlu diperkuat, terutama dalam konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat setempat untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal.
3. Bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini?

Ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya dinilai sudah cukup baik, dan juga untuk fasilitas dan sarana prasarana sudah memadai, mungkin karena adanya campur tangan pemerintah
Pemerataan (Equity)
1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesetaraan akses dan peluang bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal?
Akses dan peluang dalam industri pariwisata dinilai cukup, namun masih perlu diperhatikan lebih lanjut.
2. Apakah Anda melihat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini antara berbagai kelompok masyarakat atau daerah?
Ada di giri ini masih ada peminta-minta, ada juga yang menyebutkan dana kebersian, ya meskipun ada yang menganggap amal jariya
3. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara adil?
Saran untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Ketepatan (Appropriateness)
1. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan peraturan daerah no. 5 tahun 2012 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah Kabupaten kami?
Kebijakan dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian kebijakan ini dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar destinasi wisata religi?
Kesesuaian kebijakan ini dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar destinasi wisata religi juga cukup baik.
3. Apakah Anda melihat adanya aspek-aspek dalam kebijakan ini yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal?
masih perlu perhatian lebih lanjut terhadap aspek-aspek kebijakan ini yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal
Responsivitas (Responsiveness)
1. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini?
Pemerintah tampaknya telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul selama penerapan kebijakan ini, terutama dengan menerima masukan dari pengunjung dan pemangku kepentingan lainnya
2. Apakah Anda melihat adanya penyesuaian atau perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini?
Ada penyesuaian dan perbaikan menunjukkan respons yang memadai dari pemerintah terhadap kebutuhan dan masukan masyarakat

Informan : Anisa (23 Tahun)
 Jabatan : Pengunjung Makam Maulana Malik Ibrahim Dan Sunan Giri
 Tanggal : 17 April 2024

Efektivitas (Effectiveness)
1. Bagaimana menurut Anda dampak dari kebijakan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten kami?
Menurut Saya, kebijakan telah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten, terutama pada hari libur, yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan tersebut..
2. Apakah menurut Anda kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini?
Secara keseluruhan, Mbak Anisa percaya bahwa kebijakan ini telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut
3. Apa saja perubahan yang Anda lihat atau alami di sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan ini?
Perubahan yang terlihat di sektor pariwisata setelah diterapkannya kebijakan ini termasuk peningkatan kualitas fasilitas di kawasan Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim
Kecukupan (Adequacy)
1. Apakah menurut Anda kebijakan ini sudah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata?
kalau menurut saya, kebijakan ini sudah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata.
Efisiensi (Efficiency)
2. Apa saja hal-hal yang menurut Anda masih kurang memadai dalam kebijakan ini dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata?
Namun, masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam menanggapi orang yang kayak minta-minta dana untuk kebersihan di sekitar kompleks Makam Sunan Giri.
3. Bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini?
Kalau dilihat, Ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan lainnya dinilai sudah cukup baik, terutama dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Pemerataan (Equity)
1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesetaraan akses dan peluang bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal?
Lumayan ya mbak soalnya itu masih ada peminta-minta yang mengatas namakan kebersihan area makam,

2. Apakah Anda melihat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini antara berbagai kelompok masyarakat atau daerah?
Ya ada contohnya itu kayak peminta” itu mbak
3. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan kebijakan ini agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara adil?
Perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak.
Ketepatan (Appropriateness)
1. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan peraturan daerah no. 5 tahun 2012 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah Kabupaten kami?
Cukup sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wisata religi di wilayah Kabupaten.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian kebijakan ini dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar destinasi wisata religi?
Baik ya mbakk
3. Apakah Anda melihat adanya aspek-aspek dalam kebijakan ini yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal?
Menerutsaya kebijakan sudah sesuai ya mbak
Responsivitas (Responsiveness)
1. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini?
pemerintah telah merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini.
2. Apakah Anda melihat adanya penyesuaian atau perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini?
Setelah dapat kritikan itu nanti mungkin baik pihak pengelolanya maupu pemrintah sebisamungkin untuk berkoordinasi agar kebijakan yang ada memberikan manfaat.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Surat Izin Observasi Dari Fakultas

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi. ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id		
	Surabaya, 28 Maret 2024		
Nomor	: 0987/K/FISIP/II/2024		
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal		
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Observasi</u>		
Kepada Yth.	: Pengelola Wisata Religi Sunan Giri Jl. Kedayang - Gresik No.4, Pedukuhan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121		
<p>Dengan hormat.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>			
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	AMANDA WULAN APRILIYA (NIM. 111200083)	Dsn. Kendayaan Ds. Lampah RT. 01 RW.07 Kec. Kedamean Kab. Gresik	085546410977
Guna melakukan pengambilan data di:			
"Pengelola Wisata Religi Sunan Giri "			
Dengan Judul Skripsi: "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik".			
Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.			
Dekan,  Dr. Diah Ayu Maduwinarti, M.P. NIP. 120.87.0103			

Surat Balasan Observasi



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
 Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> email : bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K

Nomor	: 070 / 200 / 437.71 / 2024	Gresik, 04 April 2024
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Dekan
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 0987/K/FISIP/III/2024 tanggal 01 April 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1. Nama : Amanda Wulan Apriliya
2. NIM/ NIK/ NIDN : 3525085604020001
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Dsn. Kendayaan Ds. Lampah Rt.01 Rw.07
5. Keperluan dilakukannya : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik"
6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : 02 April 2024 - 30 April 2024
8. Peserta/ Pengikut :

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui <https://sepekan.gresikkab.go.id>;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK
Kabid Riset dan Inovasi Daerah



HAVY WARDANA, S.T.
 Penata Tk. I
 NIP. 19801227 200901 1 001

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

Lampiran 4 Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F.101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amanda Wulan Apriliya
 NBI : 1112000083
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Drs. M. Kendry Widiyanto, MSi
 Dosen Pembimbing II : Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP
 Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	4/3/2024	Bab. 1 permasalahan (berita online) Teori ACC.		
2	5/3/2024	Bab I, II, III		
3	14/5/2024	Bab I-III ACC But pedm wawanc		
4	18/5/2024	Bab I-III ACC pedm wawanc ACC		
5	21/3/2024	Menyusun pedoman wawancara		
6	25/3/2024	ACC Turun Lapangan		
7	24/4/2024	Revisi Bab 4. Sesuaikan dengan buku pedoman		
8	30/4/2024	Revisi Bab 4 Penyajian data ← informasi 1, 2, 3.		
9	8/5/2024	ACC Prop Wji skripsi		
10	14/5/2024	ACC daptar sidang. cek turnitin 1/5		

Lampiran 5 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Dwi Mustika Sari S.T Par Sebagai Analis Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik



Wawancara dengan Bapak M. Bisri sebagai pengurus Yayasan Sunan Giri



Wawancara dengan Bapak Sudasir sebagai pengelola Makam Maulana Malik Ibrahim



Wawancara dengan Mbak Ayu sebagai pengunjung Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim



Wawancara dengan Ibu Nur sebagai pengunjung Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim



Wawancara dengan Mbak Anisah sebagai pengunjung Makam Maulana Malik Ibrahim

Dokumentasi Wisata Religi Sunan Gresik



Dokumentasi Wisata Religi Maulana Malik Ibrahim



Lampiran 6 Data Pendukung Wawancara



Masyarakat yang minta sumbangasi mengatas namakan Wisata Religi di Makam Sunan Giri



Sumbangan atau kotak amal yang resmi pada Makam Sunan Giri



Alur pasar wisata



Saran Penunjang di Kawasan Makam Sunan Giri

Lampiran 7 Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 308/K/LOD/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amanda Wulan A.

NBI : 1112000083

Berdasarkan hasil uji tumintin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Mengetahui
Kepala Lab. Otonomi


 Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi


 Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

Lampiran 8 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Amanda Wulan Apriliya
NIM : 1112000083
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik

Catatan Perbaikan:

TIDAK ADA

Surabaya, 27 Mei 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 9 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Amanda Wulan Apriliya

NIM : 1112000083

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik

Catatan Perbaikan:

① Persama & perbedaan
penelitian dan
penelitian penulis
di posisi perbaikan

Surabaya, ^{27/5 2024}
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

[Signature]
A.S.

Revisi dari Dosen Penguji,

[Signature]
A.S.

^{27/5 2024}

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 10 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Amanda Wulan Aprilia

NIM : 1112000083

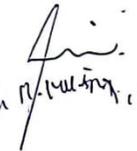
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik

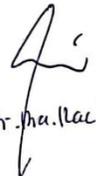
Catatan Perbaikan:

- ①. Kerangka berpikir disesuaikan
- ②. Kondisi yg ada ppt apa saja setelah di evaluasi ppt apakah?

Surabaya, 29 - 05 - 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Dr. Dra. N. Mulyanti, M.P.

Revisi dari Dosen Penguji,


Dr. Dra. Rachmawati Horatia, M.P.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.